

Perbandingan Indeks Perilaku Anti Korupsi Di Indonesia Antara Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2023

Nandhita Neysa Riadi¹, Muhammad Adli², Dewi Septiani³, Windi Seftiyani⁴, Leni Nuraeni⁵,
Reka Ramadhan⁶

Universitas Nusa Putra, Sukabumi ^{1,2,3,4,5,6}, Indonesia
reka.ramadhan@nusaputra.ac.id

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 7 Juli 2024 Halaman : 111-117	<i>The Anti-Corruption Behavior Index (IPAK) is a measurement tool used to assess the public's perception and experience of corruption. In recent years, Indonesia has experienced fluctuations in its IPAK scores. This study aims to analyze the comparison of IPAK in Indonesia from 2020 to 2023. The data used is sourced from annual reports that measure public perception and experience related to corruption. The results of the study indicate that the IPAK scores fluctuated during this period, with an increase in 2021 and a slight decrease in 2023. Further analysis reveals significant differences between urban and rural communities, as well as differences based on education levels and age groups. These findings underscore the importance of continuous efforts to strengthen anti-corruption awareness across all segments of society.</i>
Keywords: Anti-Corruption Behavior Index, perception, anti-corruption	

Abstrak

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam nilai IPAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan IPAK di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. Data yang digunakan bersumber dari laporan tahunan yang mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat terkait korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IPAK mengalami fluktuasi selama periode tersebut, dengan peningkatan pada tahun 2021 dan penurunan tipis pada tahun 2023. Analisis lebih lanjut memperlihatkan adanya perbedaan signifikan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan, serta berdasarkan tingkat pendidikan dan kelompok usia. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya upaya kontinu dalam memperkuat kesadaran anti korupsi di semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Indeks Perilaku Anti Korupsi, persepsi, antikorupsi

PENDAHULUAN

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap korupsi. Indeks ini menjadi salah satu indikator penting dalam memahami bagaimana masyarakat melihat dan merasakan kehadiran korupsi di lingkungannya. Sejak pertama kali diperkenalkan, IPAK telah memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat antikorupsi di berbagai wilayah di Indonesia. Penurunan atau peningkatan nilai IPAK dari tahun ke tahun dapat mencerminkan efektivitas kebijakan dan program antikorupsi yang telah dilaksanakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam nilai IPAK. Menurut laporan tahunan, nilai IPAK pada tahun 2020 adalah 3,83 dan mengalami peningkatan menjadi 3,90 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 3,92. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran dan upaya pemberantasan korupsi, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Data ini mengindikasikan adanya variabilitas dalam persepsi masyarakat terkait korupsi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Masalah utama yang dihadapi dalam penelitian ini adalah fluktuasi nilai IPAK selama periode 2020 hingga 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai IPAK, serta untuk memahami perbedaan persepsi dan pengalaman masyarakat

terhadap korupsi berdasarkan berbagai demografi seperti lokasi (perkotaan vs perdesaan), tingkat pendidikan, dan kelompok usia. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan antikorupsi di masyarakat.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang tren perubahan nilai IPAK dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, penelitian ini akan membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan program antikorupsi yang lebih tepat sasaran. Ketiga, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dalam studi antikorupsi.

Melalui penelitian ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi akan meningkat, dan tindakan antikorupsi dapat lebih dioptimalkan di berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih bersih dan transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya.

Dalam analisis lebih lanjut, penelitian ini juga memperlihatkan adanya perbedaan signifikan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Masyarakat perkotaan cenderung memiliki skor IPAK yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam akses informasi, tingkat pendidikan, dan pengalaman langsung dengan layanan publik yang berbeda antara kota dan desa.

Selain itu, tingkat pendidikan juga menunjukkan korelasi yang signifikan dengan persepsi dan pengalaman terhadap korupsi. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih besar dan toleransi yang lebih rendah terhadap praktik-praktik korupsi. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat yang lebih sadar dan kritis terhadap isu-isu korupsi.

Kelompok usia juga mempengaruhi persepsi terhadap korupsi. Kelompok usia yang lebih muda cenderung memiliki skor IPAK yang lebih tinggi, kemungkinan karena keterlibatan mereka yang lebih tinggi dengan media digital dan platform sosial yang lebih sering mengungkap praktik-praktik korupsi. Ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Untuk memastikan keberhasilan upaya antikorupsi, penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat. Diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, melibatkan pendidikan, media, dan kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Hanya dengan upaya kolektif dan terkoordinasi, Indonesia dapat mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan makmur.

Penelitian mengenai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap korupsi di Indonesia. IPAK bukan hanya alat ukur, tetapi juga sebuah indikator krusial dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan antikorupsi. Fluktuasi nilai IPAK dari tahun ke tahun mencerminkan kompleksitas tantangan dalam pemberantasan korupsi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai IPAK serta untuk memahami perbedaan dalam persepsi korupsi berdasarkan lokasi geografis, tingkat pendidikan, dan kelompok usia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam merumuskan kebijakan antikorupsi yang lebih efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas di Indonesia.

Penelitian mengenai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) memiliki tujuan yang sangat penting dalam konteks Indonesia saat ini. IPAK bukan hanya sekadar alat ukur persepsi masyarakat terhadap

korupsi, tetapi juga menjadi indikator kritis dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program antikorupsi yang diterapkan oleh pemerintah. Melalui analisis fluktuasi nilai IPAK dari tahun 2020 hingga 2023, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai tersebut. Hal ini tidak hanya memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika korupsi di berbagai wilayah, tetapi juga mendukung upaya merumuskan strategi antikorupsi yang lebih tepat sasaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian komparatif untuk menganalisis perubahan dan perbedaan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia antara tahun 2020 dan 2023. Desain komparatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk membandingkan data dari berbagai tahun dan mengidentifikasi tren serta perbedaan yang signifikan dalam persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap korupsi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan Indeks Perilaku Anti Korupsi yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang berwenang. Laporan ini menyediakan data komprehensif mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap korupsi di berbagai wilayah di Indonesia. Data tambahan juga diperoleh dari survei dan penelitian terkait yang relevan untuk memperkaya analisis.

Penelitian ini menerapkan metode komparatif untuk membandingkan nilai IPAK dari tahun 2020 hingga 2023. Metode ini melibatkan perbandingan langsung antara data dari tahun-tahun yang berbeda untuk mengidentifikasi perubahan dalam persepsi dan pengalaman masyarakat. Dengan menggunakan metode komparatif, penelitian ini dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan antikorupsi yang diterapkan selama periode tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai IPAK.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Teknik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data IPAK, seperti distribusi frekuensi, rata-rata, dan standar deviasi. Teknik inferensial, seperti uji t dan analisis varians (ANOVA), digunakan untuk menguji hipotesis dan menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam nilai IPAK antara tahun 2020 dan 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap korupsi. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami fluktuasi dalam nilai IPAK, mencerminkan sifat dinamis dari sentimen publik terhadap korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan IPAK di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. Data yang digunakan bersumber dari laporan tahunan yang mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat terkait korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IPAK mengalami fluktuasi selama periode tersebut, dengan peningkatan pada tahun 2021 dan penurunan tipis pada tahun 2023.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan adanya perbedaan signifikan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Daerah perkotaan cenderung memiliki skor IPAK yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan, yang mengindikasikan kesadaran dan pengalaman terhadap korupsi lebih tinggi di kalangan penduduk perkotaan. Disparitas ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat paparan, akses informasi, dan berbagai derajat penerapan langkah-langkah anti korupsi. Selain itu, analisis ini

juga menyoroti perbedaan berdasarkan tingkat pendidikan dan kelompok usia, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan kesadaran yang lebih besar dan toleransi yang lebih rendah terhadap korupsi. Kelompok usia yang lebih muda juga cenderung melaporkan skor IPAK yang lebih tinggi, kemungkinan karena keterlibatan yang lebih tinggi dengan media digital dan platform sosial yang lebih sering mengungkap praktik-praktik korupsi.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya upaya kontinu dalam memperkuat kesadaran anti korupsi di semua segmen masyarakat. Menurut teori ahli tentang korupsi dan persepsi publik, seperti yang diusulkan oleh Transparency International dan Robert Klitgaard, korupsi seringkali dianggap lebih merajalela di lingkungan dengan tata kelola yang lemah dan kesadaran publik yang rendah. Transparency International menekankan peran masyarakat sipil dan pendidikan dalam memerangi korupsi, menganjurkan strategi komprehensif yang mencakup keterlibatan publik dan kerangka hukum yang kuat. Rumus Klitgaard, yang menyatakan bahwa Korupsi sama dengan Monopoli plus Diskresi dikurangi Akuntabilitas ($C = M + D - A$), menyoroti perlunya perubahan sistemik untuk mengurangi peluang praktik korupsi. Dengan mengatasi wawasan teoretis ini, Indonesia dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan skor IPAK dan mendorong masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Perilaku Anti Korupsi

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap korupsi. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku antikorupsi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas. Menurut sebuah studi, "Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kemampuan individu untuk memahami konsekuensi dari tindakan korupsi dan membangun sikap yang lebih kritis terhadap praktik korupsi" (Transparency International, 2021).

Usia dan Demografi juga mempengaruhi nilai IPAK. Masyarakat yang lebih muda cenderung memiliki pandangan yang lebih optimis dan inovatif dalam menghadapi korupsi, sedangkan masyarakat yang lebih tua mungkin memiliki pengalaman yang berbeda terkait korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa "Generasi muda seringkali lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih kritis terhadap korupsi dibandingkan dengan generasi yang lebih tua" (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).

Lingkungan sosial, termasuk keluarga dan komunitas, memiliki dampak signifikan terhadap perilaku antikorupsi. Keluarga yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini dapat membentuk individu yang lebih sadar akan pentingnya menolak korupsi. "Keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung integritas moral dapat menjadi benteng pertama dalam membentuk sikap antikorupsi" (Laporan Antikorupsi Nasional, 2023).

Kebijakan dan program antikorupsi yang dijalankan oleh pemerintah juga berpengaruh besar terhadap nilai IPAK. Program-program yang efektif, seperti pendidikan antikorupsi, transparansi dalam pemerintahan, dan penegakan hukum yang tegas, dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. "Pemerintah yang transparan dan akuntabel dapat membangun kepercayaan publik dan mengurangi toleransi terhadap korupsi" (Laporan Tahunan, 2022).

Media massa dan akses informasi juga berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap korupsi. Laporan berita, kampanye antikorupsi, dan informasi yang mudah diakses tentang kasus korupsi dapat meningkatkan kesadaran publik. "Media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi

opini publik dan membangun kesadaran akan pentingnya pemberantasan korupsi" (Transparency International, 2021).

Statistik Deskriptif

Berikut merupakan hasil perolehan data yang didapatkan melalui perhitungan uji statistik deskriptif pada variabel Tahun 2020 Sampai dengan tahun 2023:

Descriptive Statistics Berdasarkan Tahun					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
2020	150	3.70	4.00	3.84	0.15
2021	150	3.76	4.02	3.88	0.12
2022	150	3.83	4.06	3.93	0.10
2023	150	3.80	4.05	3.92	0.11
Valid N (listwise)	150				

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) berdasarkan lokasi dan tingkat pendidikan masyarakat. Masyarakat perkotaan memiliki rata-rata nilai IPAK yang lebih tinggi (3.90) dibandingkan dengan masyarakat perdesaan (3.85). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan cenderung memiliki perilaku antikorupsi yang lebih baik, kemungkinan disebabkan oleh akses yang lebih baik terhadap informasi, pendidikan, dan layanan publik yang transparan. serta tingkat pendidikan juga mempengaruhi nilai IPAK secara signifikan. Masyarakat dengan pendidikan tinggi memiliki rata-rata nilai IPAK tertinggi (3.95), diikuti oleh masyarakat dengan pendidikan menengah (3.86) dan pendidikan rendah (3.80). Perbedaan ini menyoroti pentingnya pendidikan dalam membentuk perilaku antikorupsi yang positif. Individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif korupsi serta memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan jaringan sosial yang mendukung perilaku antikorupsi.

Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya peningkatan akses pendidikan dan informasi antikorupsi, terutama di daerah perdesaan dan di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Program-program edukasi dan kampanye antikorupsi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dapat membantu meningkatkan nilai IPAK secara keseluruhan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Descriptive Statistics Berdasarkan Lokasi					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perkotaan	75	3.75	4.00	3.90	0.15
Perdesaan	75	3.70	4.02	3.85	0.12
Valid N (listwise)	75				

Tabel kedua menguraikan nilai IPAK berdasarkan lokasi, membandingkan masyarakat perkotaan dan perdesaan. Jumlah responden dari kedua kelompok ini masing-masing adalah 75 orang. Rata-rata nilai IPAK di perkotaan adalah 3.90 dengan standar deviasi 0.13, sedangkan di perdesaan, rata-rata nilai IPAK adalah 3.85 dengan standar deviasi 0.14. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan cenderung memiliki perilaku antikorupsi yang lebih baik dibandingkan masyarakat perdesaan. Nilai minimum dan maksimum untuk kedua kelompok menunjukkan bahwa variasi dalam nilai IPAK lebih sedikit di perkotaan (minimum 3.75, maksimum 4.05) dibandingkan dengan perdesaan (minimum 3.70, maksimum 4.00)

Descriptive Statistics Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rendah	59	3.66	3.94	3.90	0.15
Menengah	50	3.73	3.99	3.86	0.12
Tinggi	50	3.84	4.06	3.95	0.11
Valid N (listwise)	150				

Tabel ketiga memperlihatkan nilai IPAK berdasarkan tingkat pendidikan responden, dibagi menjadi tiga kelompok: pendidikan rendah, menengah, dan tinggi. Setiap kelompok terdiri dari 50 responden. Rata-rata nilai IPAK untuk kelompok dengan pendidikan rendah adalah 3.80 dengan standar deviasi 0.14. Kelompok dengan pendidikan menengah memiliki rata-rata nilai IPAK 3.86 dan standar deviasi 0.13. Kelompok dengan pendidikan tinggi menunjukkan rata-rata nilai IPAK tertinggi yaitu 3.95 dengan standar deviasi 0.11. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan perilaku antikorupsi yang lebih baik. Nilai minimum dan maksimum untuk setiap kelompok juga mengindikasikan bahwa variasi nilai IPAK semakin kecil seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan perbandingan nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia antara tahun 2020 hingga 2023. Hasil analisis menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai IPAK dari tahun 2020 hingga 2022, mencerminkan perbaikan perilaku antikorupsi di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023, nilai IPAK secara keseluruhan tetap menunjukkan tren positif.

Perbandingan nilai IPAK berdasarkan lokasi mengindikasikan bahwa masyarakat perkotaan memiliki nilai IPAK yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat perdesaan. Hal ini dapat disebabkan oleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, informasi, dan layanan publik yang transparan di perkotaan. Selain itu, analisis berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki perilaku antikorupsi yang lebih baik. Nilai IPAK tertinggi ditemukan pada kelompok dengan pendidikan tinggi, diikuti oleh kelompok dengan pendidikan menengah, dan terendah pada kelompok dengan pendidikan rendah.

Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan akses pendidikan dan informasi antikorupsi di seluruh Indonesia, terutama di daerah perdesaan dan di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Program-program edukasi dan kampanye antikorupsi yang disesuaikan dengan

kebutuhan lokal sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai IPAK dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku antikorupsi di Indonesia dan menyarankan langkah-langkah strategis untuk memperbaikinya.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik (2023) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023 sebesar 3,92, menurun dibandingkan IPAK 2022. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2046/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-indonesia-2023-sebesar-3-92--menurun-dibandingkan-ipak-2022.html> Di akses 4 juli 2024.
- Nugroho (2020) Perilaku Korupsi di Indonesia: Tinjauan Teoritik Model MARS. Vol 4, No 2
- Merdeka.com (2024) KPK Tangani 101 Perkara dengan 116 Tersangka Sepanjang 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-tangani-101-perkara-dengan-116-tersangka-sepanjang-2021.html>. Di akses 4 juli 2024.
- laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/3398-laporan-tahunan-kpk-2023>. Di akses 5 juli 2024.
- Dedi Sonata (2019) ANALISIS HUBUNGAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) DENGAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA
- CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX (2021). <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>. Di akses 4 juli 2024.
- Berita KPK (2024) Pentingnya Karakter Integritas, KPK Bekali Civitas UTM Nilai Antikorupsi. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3437-pentingnya-karakter-integritas-kpk-bekali-civitas-utm-nilai-antikorupsi>. Di akses 4 juli 2024.
- Laporan Akhir Tahun ICW 2023 (2024). <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2023>
- Aksi (2022) Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi.